

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah saya lakukan serta pembahasan yang telah saya kerjakan, maka dapat diambil kesimpulan antara lain:

1. Prosedur penatausahaan pengeluaran terdiri atas dua bagian yaitu, penatausahaan pengeluaran pembebanan uang persediaan dan penatausahaan pembebanan langsung (LS).

2. Pembayaran belanja pegawai seperti gaji dan tunjangan termasuk kedalam proses penatausahaan pengeluaran pembebanan langsung (LS) yang terdiri dari :

- a. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)

SPD dibuat oleh BUD dalam rangka manajemen kas daerah yang dimuat dalam DPA-SKPD dan anggaran kas yang telah disahkan oleh PPKD. Digunakan untuk pengajuan SPP UP/GU/TU/LS.

- b. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS atas pembayaran gaji dan tunjangan kepada PPK-SKPD beserta kelengkapan dokumennya antara lain, surat pengantar SPP-LS Gaji, ringkasan SPP-LS Gaji, rincian SPP-LS Gaji dan lampiran SPP-LS Gaji.

- c. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)

PPK-SKPD menerima dan meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran. Jika dokumen lengkap dan sah maka SPP-LS akan diterbitkan untuk ditandatangani oleh PA/KPA. Apabila belum lengkap maka akan dikembalikan untuk diperbaiki oleh bendahara pengeluaran.

d. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Kuasa BUD menerima dan meneliti dokumen SPM-LS yang diajukan oleh PA/KPA. Jika dokumen lengkap dan sah maka SP2D akan diterbitkan, apabila belum lengkap maka BUD akan menolak untuk menerbitkan SP2D dan dikembalikan kepada PA untuk dilengkapi dan diperbaiki.

3. Bagian yang terkait atau yang menangani prosedur pembuatan daftar gaji dan prosedur pengeluaran gaji antara lain: bagian kepegawaian, bagian pembuat daftar gaji, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran bertugas membukukan gaji dan tunjangan belanja pegawai dalam rangka pengelolaan administrasi belanja pegawai secara tertib.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan DPRD Kota Sawahlunto dapat menciptakan tata cara pengelolaan pengeluaran gaji dan tunjangan pegawai yang efektif dan efisien.
2. Diharapkan Pemerintah lebih ketat dalam penempatan pegawai bagian keuangan dikarenakan pada setiap instansi atau perusahaan, bagian keuangan inilah yang memegang peran penting. Jadi, seharusnya bagian keuangan harus ditempati oleh orang yang ahli dalam bidang keuangan.